

MU'AWIYAH IBN ABI SUFYAN (Dari Gubernur Hingga Khalifah 18 H/ 639 M- 60 H/668M)

Mami Nofrianti

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

maminofrianti@uinmybatusangkar.ac.id

Alfi Husni

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

alfihusni@uinmybatusangkar.ac.id

Wardatun Nabilah

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

wardatunnabilah@uinmybatusangkar.ac.id

ABSTRAK

Mu'awiyah ibn Abi Sufyan merupakan salah satu tokoh sentral dalam sejarah Islam awal, yang berhasil mengubah perannya dari gubernur Suriah menjadi pendiri Dinasti Umayyah. Artikel ini mengkaji perjalanan politik Mu'awiyah sejak diangkat sebagai gubernur oleh Khalifah Umar ibn Khattab (18 H/639 M) hingga naiknya menjadi khalifah (41 H/661 M) setelah Perang Shiffin dan perjanjian dengan Hasan ibn Ali. Dengan metode analisis historis, penelitian ini mengeksplorasi strategi kepemimpinan, kebijakan administratif, serta faktor-faktor yang memungkinkan Mu'awiyah membangun kekuasaan yang stabil, termasuk sistem pemerintahan terpusat dan diplomasinya yang efektif. Artikel ini juga membahas kontroversi seputar legitimasi kekuasaannya, transformasi sistem kekhalifahan menjadi monarki, serta warisannya dalam membentuk sejarah politik Islam. Temuan menunjukkan bahwa Mu'awiyah berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan dinasti yang bertahan selama hampir satu abad, meskipun menuai kritik dari berbagai kalangan.

Kata Kunci: Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, Gubernur, Khalifah

Pendahuluan

Mu'awiyah ibn Abi Sufyan merupakan salah satu pemimpin besar di zamannya. Dalam 40 tahunan masa kepemimpinannya beliau mampu mencapai kemajuan di berbagai bidang yang berpengaruh pada perkembangan Islam berikutnya. Dalam masa 40 tahun tersebut dibagi dua masa yaitu 20 tahun pertama masa beliau menjadi seorang Gubernur, dan lebih kurang 20 tahun berikutnya masa beliau menjadi seorang Khalifah besar. Di masa kekhalifahan, beliau mampu menyatukan Umat Islam kembali setelah sebelumnya mengalami kekacauan dan konflik dalam waktu yang cukup lama. Namun dalam penulisan Sejarah Islam beliau merupakan salah seorang pemimpin yang banyak dizhalimi dalam penulisan sejarah, diantaranya ada yang mengatakan beliau seorang yang licik dan penuh tipu muslihat dan sebagainya dalam meraih kekuasaan untuk mendirikan kekhalifahan bani Umayyah. Namun fakta Sejarah mengungkapkan bahwa di masa

kepemimpinannya beliau merupakan salah seorang pemimpin yang sangat dicintai rakyatnya yang dibuktikan dengan perkembangan islam dicapai dimasanya. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk membahas tulisan ini dengan mengungkapkan berbagai usaha dan kebijakan bahkan peranan beliau dalam perkembangan Peradaban Islam di mulai dari masa kegubernurannya hingga masa kekhalifahannya.

Metode Penelitian

Kajian ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Metode yang diterapkan adalah deskriptif analitis, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber dokumen seperti literatur Sejarah Islam, jurnal, media cetak, dan laporan penelitian yang sesuai dengan topik. Proses selanjutnya melibatkan pembacaan, pemahaman, dan analisis terhadap data-data tersebut guna merumuskan solusi atas persoalan yang diangkat dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Muawiyah ibn Abi Sufyan

Muawiyyah ibn Abi Sufyan sejak lahir diberi nama lengkap Abu ‘Abd al Rahman Mu’awiyah ibn Abi Sufyan Shakhar ibn Harb ibn Umayyah ibn ‘Abd Syam ibn ‘Abd Manaf ibn Qushayy. (Fatmawati, 2010: 185). Beliau dilahirkan dua tahun sebelum diutusnya Rasulullah SAW. (Adib Khairil Mustafa, 2021: 61). Ia merupakan putra dari Abu Sufyan merupakan seorang pemuka Quraisy yang awalnya menjadi musuh Nabi yang sangat kejam. Beliau dilahirkan beberapa tahun sebelum Bit’sal al Rasul dan baru masuk Islam ketika peristiwa Fathul Makkah. Ia ikut Bersama kaum muslimin lainnya untuk memerangi musuh-musuh Islam setelah beliau masuk Islam. Perang Hunayn atau yang dikenal dengan perang Hawazin adalah Perang pertama yang diikuti oleh Muawiyah yang terjadi pada Bulan Ramadhan- Syawwal 8 H. Nabi Muhammad SAW mempercayainya dan beberapa sahabat Nabi yang lainnya menjadi Penulis wahyu karena kepandaianya dalam baca-tulis.

Nabi pernah mengangkatnya sebagai sekretaris pribadi dan berkenan menikahi saudaranya yang perempuannya yang Bernama Umi Habibah (K. Ali, 2003: 257). Karier politiknya mulai menonjol pada masa Umar ibn al Khatthab ketika ia diangkat menjadi pimpinan pada sebuah district di Syiriah. Bahkan tidak lama setelah itu ia diangkat menjadi Gubernur berkat kecakapan kerja dan keberhasilan kepemimpinnya yang menguasai seluruh wilayah Provinsi Syiria pada Masa Umar ibn al Khatthab. Bahkan pada masa kekuasaan khalifah Utsman ibn Affan pun ia tetap dipertahankan sebagai Gubernur Syiria.

Keaktifannya dalam meluaskan wilayah kekuasaan Islam selama ia menjadi Gubernur sehingga menjadikan seluruh wilayah Syiria menjadi wilayah Islam. Ia mempelopori terbentuknya Angkatan laut tentara Islam dan berhasil menciptakan kedamaian dan kemakmuran sehingga rakyat sangat menyukai kepemimpinannya. Ia adalah seorang pemberani di medan peperangan, cerdik dan berstrategi, tegas dalam kata.

Ia berhasil mempengaruhi Amr ibn Ash yang merupakan salah seorang Gubernur Mesir untuk bekerjasama dengannya. Ia wafat dalam usia 75 tahun setelah lebih kurang 20 tahun menjadi khalifah.

Pengangkatan Muawiyah Menjadi Gubernur

Muawiyah pertama kali diangkat menjadi Gubernur Syam oleh Khalifah Umar ibn Al-Khattab. Bakat kepemimpinannya mulai tampak ketika ia ditugaskan sebagai panglima perang untuk menaklukkan Qaisariyah, sebuah kota dengan benteng kokoh dan penjagaan yang kuat, pada tahun 15 H (Amaliatulwalidain, 2018: 45). Kemenangan gemilang ini, yang diikuti oleh kesuksesan menaklukkan wilayah-wilayah Byzantium Romawi lainnya, menjadi prestasi penting baginya. Atas dasar itulah, Umar kemudian mengangkatnya menjadi Gubernur Yordania pada tahun 17 H (Amaliatulwalidain, 2018: 45). Kesempatan memimpin yang lebih besar datang pada tahun 18 H, ketika Muawiyah diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Syam, menggantikan kakaknya, Yazid ibn Abu Sufyan, yang wafat akibat wabah Tha'un 'Amwas (Melia Frastuti, dkk, 2020: 122). Dengan pengangkatan ini, ia akhirnya memimpin wilayah Damaskus, Ba'labak, dan Balqa.

Pengangkatan Muawiyah ibn Abu Sufyan banyak menuai protes di kalangan sahabat kala itu. Namun Umar berani menjamin bahwa pilihannya ketika itu adalah pilihan yang tepat karena tidak bisa dipungkiri prestasi, kapasitas dan kepemimpinan Muawiyah yang telah disaksikannya dan membuat Umar bin Khattab sangat mempercayainya.

Proses Peralihan Kekuasaan dari Gubernur menjadi Khalifah

Kekhalifahan Muawiyah adalah awal kekuasaan Bani Umayyah (Ikhsan 2013). Masa kekuasaan Muawiyah ibn Abu Sufyan sebagai Gubernur Syam adalah masa-masa yang penuh dengan peristiwa-peristiwa sehingga wilayah tersebut dikatakan sebagai kantong wilayah jihad terpenting karena Islam telah mendominasi di sana. Setelah Ali wafat, jabatan khalifah digantikan oleh Muawiyah meskipun pada masa sebelumnya Hasan putra tertua dari khalifah Ali pernah menjabat beberapa bulan. Dengan dibaiatnya Muawiyah menjadi khalifah, maka Dinasti Bani Umayyah berdiri secara resmi sebagai khalifah yang baru dengan khalifah pertamanya adalah Muawiyah ibn Abu Sufyan Tahun 661 M.

Bani Umayyah memerintah selama sekitar 90 tahun dan mengubah sistem pemerintahan Islam yang awalnya demokratis menjadi monarki herediter (kerajaan turun-temurun) (Fatah Syukur, 2010:72). Muawiyah, sebagai khalifah pertama dinasti ini, dianggap sebagai pengganti sistem republik Islam yang demokratis dengan sistem Monarki (K.Ali, 2003: 262). Ia melembagakan sistem suksesi kekuasaan berdasarkan garis keturunan dengan menunjuk putranya, Yazid, sebagai putra mahkota. Model suksesi ini kemudian menjadi preseden yang diikuti oleh penguasa-penguasa setelahnya, termasuk Dinasti Abbasiyah dan dinasti-dinasti Islam lainnya, sehingga ia dipandang sebagai peletak dasar sistem kerajaan turun-temurun dalam sejarah politik umat Islam (Abdul Aziz, dkk, 2020: 76). Sebagai khalifah pertama Bani Umayyah, Muawiyah memindahkan

pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Alasannya, wilayah Syam (yang mencakup Damaskus) telah menjadi basis kekuatannya sejak ia menjabat sebagai gubernur pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab. Damaskus dinilai strategis karena terletak di tengah-tengah antara wilayah Islam timur (Irak dan Persia) dan barat (Mesir dan Afrika), serta di sana telah terdapat struktur birokrasi dan kekuasaan yang telah kokoh (Ash-Shallabi, 2012: 344).

Meskipun Muawiyah resmi menjadi khalifah, namun ia masih memiliki kekuasaan yang terbatas. Hal ini dikarenakan Sebagian wilayah masih belum mengakui kekhalifahannya. Penduduk Irak masih menganggap Hasan Putra tertua Ali sebagai khalifah penerus Ali ibn Abi Thalib, sedangkan penduduk Mekkah dan Madinah tidak memiliki loyalitas yang kuat terhadap khalifah keturunan Sufyan yang karena mereka baru mengakui kenabian Muhammad baru pada saat Fathul Makah. (P. Hitti, 2022: 236).

Usaha dan Kebijakan Muawiyah

Muawiyah terus merangkai kemenangan melawan Romawi sejak penaklukan Qaisariyah. (Bastoni 2012). Selama masa jabatannya sebagai Gubernur Syiria, ia giat melancarkan perluasan wilayah kekuasaan Islam sampai pada perbatasan wilayah kekuasaan Bizantium. Pada masa pemerintahan khalifah Ali, Muawiyah terlibat konflik dengan Ali dalam hal mempertahankan kedudukannya sebagai Gubernur Syiria, hingga mulai saat itu timbul ambisinya untuk menjadi khalifah dengan mendirikan pemerintahan Dinasti Umayyah. Ia menjadi khalifah setelah berdamai dengan Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib yakni putra tertua dari khalifah Ali ibn Abi Thalib pada Tahun 661 M.

Ketika ia menjadi khalifah, ia berhasil mengamankan situasi dalam negeri, kemudian ia segera mengerahkan pasukannya untuk mengadakan upaya perluasan wilayah. Peristiwa penting dan bersejarah selama masa kekuasaanya adalah Penaklukan ke Afrika Utara. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa Amru ibn Ash merupakan Gubernur pembantu Mu'awiyah di Mesir. Ia sering digangu oleh kekuasaan Romawi di Afrika Utara. Oleh karena itu Ammr ibn Ash mengerahkan pasukan Islam di bawah pimpinan Jendral Uqbah ke Afrika Utara untuk bertempur melawan pasukan Romawi dan akhirnya berhasil menaklukan wilayah Afrika Utara. Kairawan berhasil diduduki pasukan Uqbah hingga ke bagian Selatan wilayah Tunisia. Pada tahun 50 H/ 670 M, Mu'awiyah membangun sebuah benteng yang kuat untuk perlindungan kota Kairawan dari serangan pasukan Barbar. Kemudian Mu'awiyah menjadikan Kairawan sebagai Ibukota wilayah propinsi Afrika Utara.

Salah satu ambisi politik Mu'awiyah adalah mengadakan penyerangan ke Ibukota Bizantium yaitu Konstantinopel. Ia menyiapkan sebuah pasukan besar untuk melakukan ekspedisi kesana di bawah pimpinan putranya yakni Yazid ibn Muawiyah. Namun misi ini tidak berhasil. Muawiyah juga dikenal sebagai pendiri Angkatan laut dalam Sejarah Islam. Bahkan ketika menjabat sebagai Gubernur di Syiria ia sudah memiliki 50 armada laut yang Tangguh yang dipersiapkan untuk bertempur melawan Yunani di Laut Tengah.

Ketangguhan Angkatan Laut ini berhasil menaklukan Pulau Cyprus, Rodhes dan beberapa kepulauan lainnya di sekitar Asia Kecil (K. Ali, 2003: 262).

Muawiyah banyak mencapai keberhasilan dan kesuksesan besar pada masa pemerintahannya termasuk dalam hal perluasan wilayah. Ia berhasil melakukan perluasaan wilayah kekuasaan Islam sampai ke Arah Timur. Menaklukan Herald pada tahun 41 H/ 661 M. Dua tahun setelah itu berhasil menaklukan satu persatu daerah Kabul Ghazna, Balkh, Qandahar. Luasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa ini merupakan bukti kecakapan Muawiyah dalam teknis strategis dan konsolidasinya. Sebagian besar prestasi dinasti Bani Umayyah adalah penaklukannya terhadap beberapa kota di berbagai benua, meliputi Asia, Eropa dan Afrika. Di Asia, Dinasti Bani Umayyah berhasil menaklukkan Transoxiana (Asia Tengah), yakni daerah-daerah yang terletak di Sungai Jihun dan Sungai Sihun, serta wilayah Sindh (Pakistan), dan ditambah dengan wilayah-wilayah yang sudah ditaklukan sebelumnya pada masa khulafaur Rasyidin yaitu Persia Khurasan, Sijistan, Jirjan Tibristan, Armenia, Azerbaijan yang kemudian wilayah-wilayah ini menjadi wilayah utama dalam dunia Islam. (Amaliatulwalidain, 2018: 45).

Keberhasilan dari usahanya dalam mendirikan Dinasti Bani Umayyah ini bukan hanya karena kecakapannya dalam berdiplomasi tetapi juga karena sejak awal ia juga mendapatkan dukungan dari keluarga Bani Umayyah dan dukungan dari Negeri Syam. Ia seorang yang bijaksana dalam menentukan, mengangkat serta menempatkan pejabat-pejabat dalam pemerintahan. Dalam diri Muawiyah terkumpul sifat-sifat seorang penguasa, politikus, dan administrator. Keberhasilan Muawiyah mendirikan Dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam peran Shiffin dan terbunuhnya Ali bin AbiThalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki “basis rasional” yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, ia mendapatkan dukungan yang kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah, ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan para pejabat-pejabatnya.(Setiawan 2020)

Peranan Muawiyah dalam Perkembangan Peradaban Islam

Kesatuan umat Islam memudar semenjak terjadinya pembunuhan khalifah Utsman (35H/ 656 M). Selama masa kekuasaannya, Mu'awiyah berusaha keras untuk memulihkan kembali kesatuan wilayah Islam. Oleh karena itu ia memindahkan ibu kota imperium dari Kufah ke Damascus. Sumber yang menyebabkan kekacauaan tersebut adalah konflik antara kelompok Khawarij, Himyariyah, dan Mudariyyah, oleh karena itu Muawiyah berusaha untuk merukunkan kelompok-kelompok tersebut. (K. Ali, 2003: 258). Muawiyah berhasil memulihkan kesatuan ummat Islam dan sekaligus melindungi keutuhan imperium Islam. Ia orang yang terkenal pandai bergaul dengan berbagai macam temperamen manusia, ia mengangkat para ahli strategi seperti Mughirah, Zaid bin Sumayyah dan Amr ibn Ash untuk menjadi pembantunya dalam menyelesaikan situasi pemerintahan yang tidak stabil ketika itu.

Muawiyah dikenal sebagai seorang administrator yang cakap. Ia tercatat sebagai penguasa Islam pertama yang membentuk biro administrasi negara yang disebut Diwan

al Hattam. Selain itu, ia juga membentuk dan mengoperasikan jawatan pos (Diwan al Barid) serta membentuk lembaga kepolisian (al Syurtha). Dalam bidang administrasi, ia memisahkan urusan kepidanaan dari administrasi non-pidana. Muawiyah juga mengangkat banyak pegawai di tingkat provinsi dan menunjuk pejabat khusus yang bertugas menangani pendapatan negara (shahib al-kharaj). Untuk meningkatkan pemasukan negara, ia menetapkan berbagai kebijakan yang berfokus pada sektor perpajakan, dengan menyisihkan sebagian dari dana tersebut sebagai santunan bagi masyarakat fakir miskin.

Pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam Kekhalifahan Bani Umayyah membawa perubahan besar yang memengaruhi perkembangan politik, sosial, dan budaya Islam secara mendalam dan jangka Panjang.(Bestari, A'la Abd., and Rochimah 2024). Pencapaian Muawiyah dalam bidang pemerintahan juga disebabkan karena faktor kelihaiannya berpolitik yang telah memberikan pengalaman berharga untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam pemerintahannya kemudian, di antaranya adalah Mengubah system pemerintahan yang awalnya bercorak demokratis menjadi pemerintahan yang bercorak monarkis. Muawiyah sebagai penguasa pertama memindahkan pusat pemerintahan yang pada awalnya berada di Madinah yang kemudian pada masanya dipindahkan ke Damaskus. Pemindahan kekhalifahan dari Madinah ke Damaskus menandai perubahan dalam focus geografis da administrative Islam dari wilayah Hijaz yang pada awalnya menjadi pusat pemerintahan Islam pada masa sebelumnya ke wilayah pusat pemerintahan baru yaitu Kota Damascus yang dekat dengan perbatasan Byzantium. Dengan demikian wilayah Damaskus tidak hanya berfungsi sebagai pusat kekuasaan politik baru tetapi juga sebagai simbol kekuasaan baru di bawah pemerintahan Bani Umayyah. Pemerintahan Bani Umayyah berupaya memperkokoh posisi system kekuasaannya. Dinasti Bani mendirikan Departemen Pencatatan (Diwanul Khatam), di mana setiap peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah harus disalin di dalam suatu register, kemudian yang asli harus disegel dan dikirimkan ke alamat yang dituju. Sebelumnya, yang dikirimkan adalah perintah-perintah yang terbuka. Bahkan pernah terjadi khalifah memberikan 1000 dirham kepada seseorang dari perpendaharaan provinsi(Ikhsan 2013). Pada masa ini terjadi pemisahan kekuasaan antara politik dan keagamaan, hal ini dilakukan bukan karena khalifah tidak kompeten tentang keagamaan. Tetapi dikarenakan karena luasnya wilayah kekuasaan Islam maka urusan keagamaan lebih diserahkan kepada ulama dan urusan kenegaraan di serahkan kepada khalifah. Pada masa ini juga terjadi pemisahkan urusan keuangan dengan urusan pemerintahan. Pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat seorang pejabat khusus yang diberi gelar sahibul kharaj. Kebijakan berikutnya adalah Perluasan wilayah kekuasaan Islam ke berbagai wilayah di luar Jazirah Arab (Adib Khairil Mustafa, 2021: 70). Mendirikan Kantor Cap (Percetakan Mata Uang (Rachman, 2018: 5).

Penguatan militer dan birokrasi yang loyal. Untuk mewujudkan birokrasi yang kuat, Muawiyah membentuk system birokrasi yang terstruktur dengan menempatkan para pejabat yang loyal kepada keluarganya dengan tujuan memastikan bahwa kendali

pemerintahan berada di bawah penguasaanya. Muawiyah memperkuat kemiliteran dan menetapkan para panglima dari keluarganya dan yang setia kepada Umayyah. Sehingga system ini dapat memberikan stabilitas pada kekuasaannya.(Bestari, A'la Abd., and Rochimah 2024). Pada masa Umayyah organisasi militer terdiri dari angkatan darat (aljund) angkatan laut (al-bahriyah), dan angkatan kepolisian (as-syurthah). Berbeda dengan masa Ustman, bala tentara pada masa ini bukan muncul atas kesadaran sendiri untuk melakukan perjuangan tetapi semacam dipaksakan, sesuai dengan politik Arabisme yang ditempuhnya, angkatan bersenjata terdiri dari orang-orang Arab atau unsur Arab.(نی غلامحس 1385) Pembebasan konstantinopel, keahlian Muawiyah bin Abu Sufyan dalam menjabat sebagai gubernur Suriah serta terpilih sebagai komando perang pembebasan wilayah Konstantinopel meski belum ditakdirkan berhasil menguasainya. (Syamsul Munir Amin, 2009). Pencapaian Muawiyah ini dilanjutkan oleh khalifah-khalifah berikutnya, yang mana terdapat beberapa khalifah paling berjasa dalam Pembangunan peradaban islam masa Dinasti Bani Umayyah ini yang pada akhirnya mampu membawa Dinasti ini mencapai masa kejayaan. Namun pada akhirnya sebagaimana dinasti lain, Dinasti Bani Umayyah inipun mengalami kemunduran dan pada akhirnya Runtuh dan digantikan oleh Bani Abbasiyah. Selama masa pemerintahan mawiyah hampir semua pemilik tanah, baik muslim mupun nonmuslim, diwajibkan membayar pajak tanah. Sementara itu pajak kepala tidak berlaku bagi penduduk muslim, sehingga banyaknya penduduk yang masuk Islam secara ekonomis merupakan latar belakang berkurangnya penghasilan negara. Namun demikian dengan keberhasilah Umayyah dalam penaklukan Imperium Sassani (Persia) beserta wilayah kepunyaan imperium Byzantium, sesungguhnya kemakmuran bagi dinasti melimpah-limpah yang megalir je dalam pembendaharaan Negara (Choirul Rofiq, 2009 -129) Pengembangan imu-ilmu agama (ulum al-diniyah) suda mulai dikembangkan karena terasa betapa penduduk-penduduk diluar Jazirah Arab sangat memerlukan berbagai penjelasan secara sistematis dan kronologis tentang Islam. Ilmu-ilmu yang berkembang saat itu antaranya tafsir, hadis, fiqh, ushul fiqh, ilmu kalam dan sirah/Tarikh.(Dalimunthe 2018).

Keruntuhan Daulah Bani Umayyah menjadi pelajaran bagi kaum Muslimin. Salah satu faktor besar penyebab keruntuhannya adalah berawal dari dampak pembunuhan Husein ibn Ali Putra kedua dari Khalifah Ali ibn Abi Thalib yang terjadi pada Masa kekhilafahan Yazid ibn Muawiyah di Karbela. Apalagi sepeninggal Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Dinasti Umayyah, yang didirikan oleh Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, mengalami kejatuhan setelah hampir satu abad berkuasa. Keruntuhannya disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, termasuk ketidakstabilan politik, ketidakpuasan sosial, serta munculnya kekuatan baru seperti Bani Abbasiyah. Berikut adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan keruntuhannya:

1. Faktor Internal

a. Krisis Legitimasi Kekuasaan

Sistem monarki turun-temurun yang diterapkan Umayyah dianggap bertentangan dengan tradisi musyawarah (syura) dalam Islam, memicu penolakan

dari kelompok oposisi, terutama Syiah dan Khawarij. Perebutan kekuasaan internal di antara keluarga Umayyah melemahkan stabilitas pemerintahan. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunannya meruapakan sesuatu yang baru bagi bangsa Arab yang awalnya lebih menekankan aspek senioritas, pengaturan yang tidak jelas. Ketidakjelasan dalam system pergantian khalifah ini menyebabkan tejadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana.(Anam Khoirudin and Mawardi 2023)

b. Diskriminasi Sosial dan Etnis (Arab vs Mawali)

Kebijakan Umayyah yang memprioritaskan suku Arab (khususnya Quraisy) menimbulkan ketidakpuasan di kalangan non-Arab (Mawali), terutama di Persia dan Afrika Utara. Mawali yang telah memeluk Islam tetap dikenakan pajak (jizyah) dan dianggap warga kelas dua, memicu pemberontakan. Banyak tokoh agama yang kecewa dengan kebijaksanaan para penguasa bani Muamayah yang tidak sesuaio dengan syariat Islam.

c. Korupsi dan Pemborosan Ekonomi

Pembangunan megah (seperti Masjid Umayyah di Damaskus) dan gaya hidup mewah para penguasa menimbulkan kesenjangan sosial. Pajak tinggi dan eksploitasi sumber daya menyebabkan kemiskinan di wilayah taklukan. Gaya hidup mewah para Khalifah juga menjadi penyebab runtuhnya Dinasti Bani Umayyah. Contohnya pada masa khalifah ke 5 yaitu Abdul Malik ibn Marwan yang di terkenal suka berfoya-foya. Hal inilah yang memicu pemberontakan Masyarakat untuk penggulingan kekuasaan Dinasti ini.

d. Pemberontakan Internal

Pemberontakan Zubairiyah (dipimpin Abdullah ibn Zubair) melemahkan kekuasaan Umayyah di Hijaz dan Irak. Gerakan Syiah dan Khawarij terus melakukan perlawanan, terutama setelah tragedi Karbala (680 M). Latar belakang terbentuknya Dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik politik yang terjadi pada masa Ali ibn Abi Thalib. Sisa-sisa Syiah dan Khawarij terus menjadi golongan yang menentang baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Kehancuran Gerakan ini menyedot kekuatan pemerintah.(Anam Khoirudin and Mawardi 2023)

2. Faktor Eksternal

a. Kebangkitan Gerakan Abbasiyah

Propaganda Abbasiyah (dengan slogan "Keadilan untuk Keluarga Nabi") berhasil memobilisasi dukungan dari Mawali, Syiah, dan kelompok anti-Umayyah. Kekalah Umayyah dalam Pertempuran Zab (750 M) menjadi titik akhir kekuasaan mereka. Munculnya kekuatan baru yang di pelopori oleh keturunan Al Abbas ibn Abdul Muthalib yang mendapat dukungan sepenuhnya dari Bani Hasyim dan golongan Syi'ah serta kelompok mawali yang merasa didiskriminasi oleh pemerintah.

b. Ekspansi Terlalu Luas

Wilayah kekuasaan yang terlalu luas (dari Spanyol hingga India) menyulitkan kontrol administratif dan pertahanan. Pemberontakan di daerah jauh, seperti di Khurasan dan Afrika Utara, melemahkan pusat kekuasaan.

c. Serangan Eksternal

Tekanan dari Kekaisaran Bizantium di perbatasan dan serangan Mongol awal (belum masif) turut memperburuk kondisi.

Kesimpulan

Mu'awiyah ibn Abi Sufyan merupakan tokoh kunci dalam sejarah politik Islam yang berhasil mengubah lanskap kekuasaan dari sistem kekhalifahan elektif menjadi monarki turun-temurun. Melalui kepemimpinannya sebagai Gubernur Suriah (sejak 18 H/639 M) hingga menjadi Khalifah (41 H/661 M), ia membangun fondasi Dinasti Umayyah dengan kebijakan administratif yang terpusat, diplomasi yang cerdik, dan kekuatan militer. Meskipun naiknya kekuasaannya diwarnai kontroversi—khususnya setelah Perang Shiffin dan perjanjian dengan Hasan ibn Ali dan Mu'awiyah berhasil menciptakan stabilitas politik yang menjadi dasar bagi kejayaan Umayyah. Warisan terbesarnya adalah transformasi sistem pemerintahan Islam, yang meskipun dikritik oleh sebagian kalangan, membuka jalan bagi konsolidasi kekuasaan dalam bentuk dinasti. Kepemimpinannya juga menegaskan peran Suriah sebagai pusat kekuatan baru dalam dunia Islam. Dengan demikian, Mu'awiyah tidak hanya meletakkan dasar bagi Dinasti Umayyah, tetapi juga memengaruhi perkembangan peradaban Islam secara struktural dan ideologis.

Daftar Kepustakaan

- Adib Khairil Mustafa. 2021. *Studi Kritis Atas Narasi Sejarah Khalifah Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan dalam Historiografi Islam*. Juspi (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) Vol 4 No 2.
- Abdul Aziz, dkk. 2020. *Mu'awiyah bin Abu Sufyan: Peletak Dasar Pemerintahan Islam Monarki (661-680 M)*. Factum: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol 9 No 1.
- Amaliatulvalidain. 2018. *Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Dinasti Umayyah (Kajian Pada Masa Pemerintahan Islam: Muawiyah Bin Abu Sufyan 661-668 M)*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Global Vol 4 No 1.
- Anam Khoirudin, Muhammad Luthfi, and Kholid Mawardi. 2023. "Periodisasi Dan Perkembangan Dinasti Umayyah." *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management* 4 (1): 53–61. <https://doi.org/10.47467/manageria.v4i1.3796>.
- Bastoni, Hepi Andi. 2012. *Wajah Politik Muawiyah Bin Abu Sufyan: Mengurai Sejarah Konflik Sunni-Syiah*. Pustaka Bustan.
- Bestari, Mochammad Ardika Akbar, A'la Abd., and Rochimah. 2024. "Dinamika Kekhalifahan Islam Bani Umayyah Di Masa Pemerintahan Muawiyah Bin Abi

Sufyan (661-680 M): Pengaruh Politik , Sosial Dan Budaya.” *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)* 1:910–20.

Dalimunthe, Latifa Annum. 2018. “Kemunduran Dan Keruntuhan Daulah Bani Umawiyah Di Damaskus Dan Andalusia (Studi Pustaka).” *Anterior Jurnal* 13 (2): 270–79.
<https://doi.org/10.33084/anterior.v13i2.283>.

Hitti, Philip K. *History of The Arabs*, Terj. Cecep Lukman Yasin Dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2010.

Ikhsan, Muh. 2013. “Politik Islam: Telaah Historis Monarchisme Mu’Awiyah Dan Konflik Yang Mengitarinya.” *Jurnal Al- ‘Adl* 6 (2): 96–109.

Melia Frastuti, dkk. 2020. *Reformasi Sistem Administrasi Pemerintahan Penaklukan di Darat dan Laut pada Era Bani Umayyah*. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol 6 No 2.

Munawir, Imam. *Mengapa Umat Islam Dilanda Perpecahan*. Surabaya: Bina Ilmu. 1985.

Murodi. *Rekonsiliasi Politik Umat Islam (Tinjauan Historis Peritiwa ‘Am Al-Jama’ah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2011.

Munir Amin, Samsul. (2009). *Sejarah Peradapan Islam*. Jakarta: Amzah.Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya Jilid II*. Jakarta: UI Press. 1986.

Setiawan, Agus Mahfudin. 2020. “Transisi Sistem Pemerintahan : Al-Khulafa Al-Rashidun Ke Dinasti Umayyah Masa Yazid Bin Muawiyah (661-683 M).” *Tsaqofah Dan Tarikh* 4 (2): 110.

بن غلام حمد سے ناپی، ”شہزادے نے“ 17 (1): 302.